



BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Kebijakan Umum dan Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

7.1.1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Pendidikan

7.1.1.1. *Peningkatan Dan Pengembangan Akses Pendidikan*

Penyediaan infrastruktur pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah (Dikmen), pendidikan non formal (PNF), pendidikan luar biasa (PLB) mengurangi kendala biaya pendidikan.

7.1.1.2. *Peningkatan Dan Pengembangan Mutu Pendidikan*

Pengembangan kurikulum, akreditasi sekolah/lembaga pendidikan, peningkatan kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan metodologi pendidikan yang membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha, penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK di bidang pendidikan, keterpaduan sistem evaluasi pendidikan, fasilitas pendukung pendidikan (laboratorium, perpustakaan, alat peraga, studio, fasilitas teknologi informasi, dll).

7.1.1.3. *Peningkatan Dan Pengembangan Tata Kelola*

Managemen pendidikan, kualitas pengelola (kepala sekolah, tenaga kependidikan, dll)

7.1.1.4. *Dukungan Terhadap Pendidikan Tinggi*

Dalam rangka meningkatkan kemandirian dan daya saing maka peran perguruan tinggi akan semakin ditingkatkan yaitu dengan memberikan dukungan terhadap pembukaan bidang studi yang relevan dengan ketersediaan sumberdaya alam dan peningkatan nilai tambah sumberdaya alam. Dukungan terhadap pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi serta mahasiswa yang menekuni bidang tertentu yang relevan dengan kebijakan peningkatan nilai tambah akan menjadi perhatian pemerintah provinsi.

Dukungan terhadap pendidikan tinggi juga akan dilakukan dalam rangka mensinergikan kegiatan akademik mahasiswa seperti kuliah kerja lapangan atau sejenisnya yang secara langsung terjun ke lapangan. Dengan demikian ada sinergi yang kuat antara upaya peningkatan kualitas keterampilan mahasiswa dengan pencapaian pemerintah provinsi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing daerah.

7.1.1.5. *Penguatan Dan Perluasan Pendidikan Non Formal Dan Informal (PNFi)*

Peran pendidikan informal perlu semakin ditingkatkan, karena sasarannya adalah untuk memberikan keterampilan praktis bagi tamatan sekolah formal bahkan alumni perguruan tinggi. Pengalaman menunjukkan bahwa ilmu yang telah diperoleh para lulusan pendidikan formal tidak serta merta dapat diterapkan. Mereka membutuhkan tambahan keterampilan dan juga pendalaman yang lebih bersifat praktek penuh untuk dapat mengerjakan hal-hal yang bersifat pragmatis. Program pendidikan non formal dan informal sangat strategis dalam upaya untuk menurunkan buta aksara dan meningkatkan, kecakapan hidup masyarakat berkesetaraan gender. Hal ini sejalan dengan komitmen internasional dalam pemberantasan buta aksara. Selain itu, dalam upaya mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan perlu ditingkatkan budaya baca masyarakat.

7.1.1.6. *Penerapan Metodologi Pendidikan Akhlak Mulia dan Karakter Bangsa*

Sistem pembelajaran saat ini di pandang belum secara efektif membangun peserta didik memiliki akhlak mulia dan karakter bangsa. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya



degradasi moral seperti penyalahgunaan narkoba, radikalisme pelajar, pornografi dan pornoaksi, plagiarisme dan menurunnya nilai kebanggaan berbangsa dan bernegara, melalui kebijakan berikut : (1) penguatan dan perluasan program pembelajaran langsung di pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM); (2) penguatan dan perluasan pendidikan kecakapan hidup untuk warga negara usia sekolah yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah dan bagi warga usia dewasa; (3) penguatan dan perluasan budaya baca melalui penyediaan taman bacaan, bahan bacaan dan sumber informasi lain yang mudah, murah dan merata serta sarana pendukungnya; (4) penguatan dan perluasan pendidikan non formal dan informal untuk mengurangi disparitas antar gender.

7.1.1.7 Pendanaan Pendidikan

Dalam periode pembangunan 2008-2013, program biaya operasional pendidikan (BOP), bantuan operasional sekolah (BOS), BOS buku, bantuan khusus murid (BKM) dan beasiswa dari SD hingga SMA/SMK telah terbukti secara signifikan menurunkan angka putus sekolah dan meringankan beban orang tua dalam menyediakan biaya pendidikan yang diarahkan pada peningkatan cakupan, kualitas dan relevansi. Kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam program biaya operasional pendidikan sebagai cikal bakal wajib belajar pendidikan 12 tahun sejak tahun 2008 sejalan dengan kebijakan nasional pendidikan menengah universal (PMU) dalam bentuk dana BOS sekolah menengah yang secara nasional baru diluncurkan pada tahun 2012.

7.1.1.8. Penyelarasan Pendidikan dengan Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri

Hasil pendidikan harus mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kebutuhan tersebut memiliki sejumlah parameter yang harus secara tepat disesuaikan dengan pasokan lulusan layanan pendidikan, seperti jumlah, kompetensi dan potensi daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara harus mampu menciptakan dan menjaga sistem standarisasi penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan menengah yang berbasis keunggulan lokal, ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut : (1) menyelaraskan rencana pengembangan layanan pendidikan dengan rencana pengembangan industri, rencana pengembangan wilayah, rencana investasi; (2) mengembangkan sinergitas antar SKPD yang terkait dengan pasokan dan serapan tenaga kerja.

7.1.1.9. Akselerasi Pembangunan Pendidikan di Daerah Terpencil

Pembangunan pendidikan di daerah terpencil, perlu dilakukan secara khusus untuk menjamin keberpihakan dan kepastian kepada masyarakat di daerah tersebut untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Tuntutan keadilan dan kesatuan bangsa dan negara serta adanya konvensi internasional tentang pendidikan untuk semua (*education for all*), mengharuskan pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan kepada setiap warga negara dimanapun mereka berada agar dapat mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah perkotaan yang dilakukan melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut : (1) penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan dengan tunjangan khusus daerah terpencil; (2) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan TK-SD satu atap, SD-SMP satu atap dan sekolah berasrama di daerah terpencil; (3) penyediaan subsidi bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan formal dan non formal di daerah terpencil.

7.1.2. Pembangunan Kesehatan

Kesehatan berperan penting dalam peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia. Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Tenggara masih di bawah rata-rata nasional. Ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara masih masih perlu mendapat perhatian serius.

Dalam empat tahun terakhir ini telah terjadi peningkatan indeks pendidikan, kesehatan dan pendapatan per kapita, yang menunjukkan semakin membaiknya daya beli masyarakat.



Meskipun demikian, persoalan peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus tetap menjadi perhatian. Untuk itu, dalam bidang kesehatan dibutuhkan upaya yang lebih serius dan konsisten, terutama dalam peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, jumlah dan mutu sumberdaya manusia kesehatan, serta sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang dapat memberikan pelayanan prima di bidang kesehatan seperti :

7.1.2.1. *Pelayanan kesehatan semesta*

Melalui program pembiayaan dan jaminan kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara.

7.1.2.2. *Peningkatan Kualitas Status Kesehatan Masyarakat*

Peningkatan kualitas status kesehatan masyarakat dilakukan melalui, Program upaya kesehatan masyarakat, Program perbaikan gizi masyarakat, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, Program pengembangan *survalens epidemiologi* & SIK, Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, Program obat dan perbekalan kesehatan dan Program pengembangan lingkungan sehat.

7.1.2.3. *Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit*

Pada unit-unit pelayanan melalui Program peningkatan infrastruktur dan kelembagaan kesehatan rujukan penyangga diempat pusat kluster, yaitu RSUD Kolaka, RSUD Bombana, RSUD Raha dan RSUD Baubau.

7.1.2.4. *Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan*

Di daerah terpencil dan kepulauan melalui Program pengembangan pelayanan daerah terpencil kepulauan.

7.1.2.5. *Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Medis*

Dilakukan melalui Program Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Manusia Kesehatan.

7.1.2.6. *Pengembangan Kebijakan Manajemen dan Pembangunan Kesehatan*

Melalui Program perencanaan dan monev. kesehatan, Program standarisasi dan mutu kesehatan, dan Program pengembangan kelembagaan institusi pelayanan kesehatan.

Kebijakan Dan Program Pembangunan Kesehatan

Kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya peningkatan status kesehatan melalui upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Sehubungan dengan arah kebijakan tersebut, maka dikembangkan kebijakan yang sifatnya operasional tabel berikut.



**Tabel 136. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Misi I Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia**

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Prog. Pemb. Daerah	Bidang Urusan	SKPD P.Jawab
					Kondisi awal	Kondisi Akhir			
1.	Meningkatnya Akses Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi yang berkualitas	Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang berkualitas	Mengembangkan sarana prasarana SD melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun berupa penambahan RKB dan ruang Penunjang dan rehabilitasi ruang kelas serta sarana penunjangnya	Persentase Peningkatan APM Pendidikan Dasar	87.95%	96.71%	Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun	Urusan wajib	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Mengembangkan sarana prasarana SMP melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun berupa penambahan RKB dan ruang Penunjang dan rehabilitasi ruang kelas serta sarana penunjangnya						
			Membangun dan meningkatkan sarana prasarana SMA dan SMK melalui Program Pendidikan Menengah berupa pembangunan/pengembangan unit sekolah, ruang kelas baru, gedung laboratorium, ruang praktek serta sarana penunjangnya	Persentase Peningkatan APK SMA/SMK	93.28%	100%	Program Pendidikan menengah	Urusan wajib	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyediaan dana subsidi pendidikan bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi	Menyiapkan biaya pendidikan melalui Program Cerdas Sultraku	Jumlah siswa yang menjadi sasaran Program Cerdas Sultraku	1554 orang	1554 orang	Program Cerdas Sultraku	Urusan wajib	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Prog. Pemb. Daerah	Bidang Urusan	SKPD P.Jawab
					Kondisi awal	Kondisi Akhir			
2.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI)	Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, Non Formal, dan Informal (PAUDNI)	Mengembangkan sarana prasarana PAUD melalui program pendidikan PAUD berupa penambahan ruang kelas baru beserta penunjangnya	Persentase Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	42,23 %	65,83 %	Program pendidikan anak usia dini (PAUD)	Urusan wajib	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Meningkatkan pelayanan pendidikan layanan khusus melalui program pendidikan luar biasa (PLB)	Persentase Program Pendidikan Luar Biasa yang terpenuhi	85.05%	96%	Program pendidikan luar biasa	Urusan wajib	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Menurunkan angka buta aksara melalui program pendidikan non formal	Persentase Peningkatan Angka Melek Huruf penduduk usia 15 - 59 Tahun	94,94%	99.95%	Program pendidikan non formal	Urusan wajib	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat	Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat melalui program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Persentase Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan yang terpenuhi	70%	90%	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Urusan wajib	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
3.	Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatkan jumlah tenaga pendidik yang berkompeten dan berkualitas	Menetapkan jumlah kebutuhan tenaga pendidik PAUD melalui program pengawasan terhadap distribusi tenaga pendidik	Persentase Peningkatan Mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan	75%	87.6%	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Urusan wajib	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Menetapkan jumlah kebutuhan tenaga pendidik melalui program pengawasan terhadap distribusi tenaga pendidik						
4.	Meningkatnya akreditasi PAUDNI, SD, SMP, SMA	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan PAUD, Pendidikan dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal, Pendidikan Luar Biasa, Pendidik/Tenaga	Meningkatkan akreditasi dan kualitas pelayanan pendidikan PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK melalui program PAUD, Wajar Dikdas 9 Tahun, Dikmen, PNF, PLB, PMPTK dan	Terpenuhi Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	60 Bulan	60 Bulan	Program manajemen pelayanan pendidikan	Urusan wajib	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BABVII-5

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Prog. Pemb. Daerah	Bidang Urusan	SKPD P.Jawab
					Kondisi awal	Kondisi Akhir			
		kependidikan, dan manajemen pelayanan pendidikan	Manajemen Pelayanan Pendidikan						
5.	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui program bina kesehatan ibu dan KB serta bina kesehatan anak	Persentase Cakupan pelayanan Ibu Hamil minimal 4 kali selama kehamilan (K4)	82%	90%	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan	Urusan Wajib	Dinas Kesehatan
				Persentase Cakupan Kunjungan Neonatal lengkap	84%	90%	Program peningkatan pelayanan anak Balita	Urusan Wajib	Dinas Kesehatan
6.	Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Meningkatkan upaya pengendalian penyakit	Meningkatkan upaya promotif dan preventif melalui pengembangan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan	Cakupan Pelayanan Imunisasi Dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	72%	100%	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Urusan Wajib	Dinas Kesehatan
				Cakupan Rumah Tangga dengan air bersih yang layak	54%	90%	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Urusan Wajib	Dinas Kesehatan
7.	Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kefarmasian melalui penyediaan, pendistribusian dan pengawasan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase ketersediaan Obat, perbekalan kesehatan dan Vaksin	78%	90%	Program obat dan perbekalan kesehatan	Urusan Wajib	Dinas Kesehatan, Bappeda
				Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Minilokakarya program	85%	100%	Program upaya kesehatan masyarakat	Urusan Wajib	Dinas Kesehatan, Bappeda

BABVII-6

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Prog. Pemb. Daerah	Bidang Urusan	SKPD P.Jawab
					Kondisi awal	Kondisi Akhir			
		Meningkatkan mutu dan akses pelayanan gizi masyarakat	Meningkatkan mutu dan akses pelayanan gizi melalui upaya pencegahan dan penanggulangan kekurangan gizi	Persentase terbentuknya UPT Dinkes menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	35%	50%	Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi Farmasi	Urusan Wajib	Dinas Kesehatan, Bappeda
				Persentase Cakupan pemantauan pertumbuhan Balita di Posyandu (D/S)	70.3%	85%	Program perbaikan gizi masyarakat	Urusan Wajib	Dinas Kesehatan, Bappeda
				Persentase fasyankes yang terakreditasi	25%	100%	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Urusan Wajib	Dinas Kesehatan,
		Mengembangkan sistem jaminan kesehatan yang berkeadilan terjangkau seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara	Pengembangan jaminan kesehatan melalui perluasan program pembebasan biaya pengobatan dan sistem jaminan kesehatan lainnya	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan penjaminan pembiayaan Pelayanan Kesehatan	100%	100%	Program Peningkatan Yankes Perorangan Bebas Biaya (BAHTERAMAS)	Urusan Wajib	Dinas Kesehatan, RSUD, BPKAD, BPS, Bappeda
		Mengembangkan kesadaran, kemauan dan kemandirian masyarakat untuk Hidup Sehat	Pengembangan kesadaran, kemauan dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat melalui peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam PHBS dan Desa Siaga .	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Poskesdes aktif	39%	90%	Program promosi dan pemberdayaan masyarakat	Urusan Wajib	Dinas Kesehatan
8.	Meningkatnya akseptor KB dan pelayanan kesehatan reproduksi	Meningkatkan Komitmen stakeholder untuk berpartisipasi dalam menekan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatkan komitmen stakeholder untuk berpartisipasi dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam KB/KR	20%	30%	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Urusan Wajib	BP3A & KKB

BABVII-7

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Prog. Pemb. Daerah	Bidang Urusan	SKPD P.Jawab
					Kondisi awal	Kondisi Akhir			
		dan meningkatkan kesejahteraan keluarga	kesejahteraan keluarga melalui peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat untuk berwawasan Kependudukan melalui Pendekatan (KIE), dan pelayanan KB bagi masyarakat miskin	Cakupan persentase KB aktif	62%	77%	Program peningkatan pelayanan KB bagi masyarakat miskin	Urusan Wajib	BP3A & KKB
9.	Meningkatkan kualitas iman dan takwa	Meningkatkan fasilitas layanan keagamaan	Peningkatan fasilitas pelayanan kelembagaan keagamaan	Persentase pelaksanaan pelayanan kehidupan beragama	85%	90%	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Urusan Wajib	Biro Adm. Kesra
10.	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Mengembangkan pemahaman dan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan PUG	Mengembangkan pemahaman dan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan PUG melalui peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pembangunan	20%	45%	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Urusan Wajib	BP3A & KKB
				Jumlah pejabat perencana dan focal point SKPD Prov dan Kab/Kota yang mengikuti Sosialisasi, Workshop/Pelatihan PPRG (orang)	200 org	1205 org	Program Peningkatan Pemahaman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Urusan Wajib	BP3A & KKB
		Meningkatkan kualitas hidup perempuan	Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia (perempuan) melalui peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Persentase Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	100%	100%	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Urusan Wajib	BP3A & KKB

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BABVII-8



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Prog. Pemb. Daerah	Bidang Urusan	SKPD P.Jawab
					Kondisi awal	Kondisi Akhir			
			dan peningkatan kapasitas perempuan se-Sulawesi Tenggara	Jumlah Kegiatan nasional yang diikuti oleh Perempuan Sulawesi Tenggara	3 Keg	16 Keg	Program Peningkatan Kapasitas Perempuan Se-Sulawesi Tenggara	Urusan Wajib	BP3A DA & KKB
		Meningkatkan pemahaman pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan pemenuhan dan perlindungan anak berkebutuhan khusus	Meningkatkan pemahaman pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan pemenuhan dan perlindungan anak berkebutuhan khusus melalui	Persentase Peningkatan Pemahaman Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Anak dan Pemenuhan dan Perlindungan Anak berkebutuhan Khusus	20%	30%	Program Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak	Urusan Wajib	BP3A & KKB
		Meningkatkan kapasitas dan partisipasi lembaga/ organisasi masyarakat pemerhati perempuan, anak dalam pengembangan kualitas sumberdaya manusia utamanya perempuan dalam semua bidang pembangunan	Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan anak melalui keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Persentase peningkatan kapasitas dan peran aktif lembaga/ organisasi sosial pemerhati perempuan dan anak	20%	50%	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Urusan Wajib	BP3A & KKB
				Jumlah perempuan terlatih dalam bidang ekonomi	120 org	2680 org	Program Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan	Urusan Wajib	BP3A DA & KKB
				Jumlah perempuan yang pengetahuan dan kesadarannya dalam bidang politik meningkat	30 org	1084 org	Program Peningkatan Kesadaran Politik Perempuan	Urusan Wajib	BP3A DA & KKB

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BABVII-9

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator kinerja (<i>outcome</i>)	Capaian Kinerja		Prog. Pemb. Daerah	Bidang Urusan	SKPD P.Jawab
					Kondisi awal	Kondisi Akhir			
				Jumlah dokumen terkait Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan, PUG, PUHA, Perlindungan Perempuan dan Anak yang dikeluarkan oleh Provinsi	3 dok	6 dok	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Urusan Wajib	BP3A DA & KKB



7.3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Ekonomi

7.3.1. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Komoditas

- Peningkatan peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BAHTERMAS akan ditingkatkan menjadi salah satu lembaga keuangan untuk mendukung proses peningkatan nilai tambah melalui proses industrialisasi.
- Pembangunan klaster industri pedesaan akan dibangun dalam bentuk klaster usaha. Berkaitan dengan itu maka kebijakan pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan pembangunan infrastruktur akan dilaksanakan secara terintegrasi pada pusat-pusat klaster sehingga dapat memberikan dampak yang lebih luas dan merata di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Peningkatan daya saing komoditas melalui upaya menjaga keberlanjutan produksi dan penggunaan teknologi serta peningkatan nilai tambah yang dikerjakan oleh masyarakat desa.

7.3.2. Pengembangan Investasi Daerah

- Menetapkan tata ruang wilayah yang meliputi penetapan pusat-pusat kegiatan berdasarkan struktur ruang, pengaturan pola ruang dan penetapan kawasan strategis.
- Mengembangkan kawasan strategis yang meliputi : kawasan industri pertambangan di Konawe Utara, Konawe Selatan, Bombana, Kolaka, Kolaka Utara dan Buton; kawasan pertanian tanaman pangan di Wawotobi Kab. Konawe; kawasan industri perkebunan, kawasan industri kelautan dan perikanan, kawasan ekonomi terpadu di Teluk Kendari; kawasan industri semen dan kawasan pariwisata di Wakatobi.

Pengembangan kawasan strategis akan disinergikan dengan pembangunan ekonomi masyarakat, terutama terkait dengan kegiatan yang terjadi akibat *multiplier effect* dari pengembangan kawasan-kawasan tersebut.



**Tabel 137. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Misi Pembangunan Ekonomi**

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (out come)	Capaian Kinerja		Prog. Pemb. Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat	Meningkatkan stok pangan masyarakat	Peningkatan produksi dan produktifitas komoditas pertanian sekaligus pendapatan masyarakat melalui intensifikasi, ekstensifikasi, difersifikasi, dan rehabilitasi serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan	1 %	5 %	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian	Urusan Pilihan	Dinas Pertanian dan Peternakan
				Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana peningkatan produksi pertanian	7 %	35 %	Program peningkatan produksi pertanian	Urusan Pilihan	Dinas Pertanian dan Peternakan
				Jumlah promosi hasil produksi Pertanian/ perkebunan unggulan daerah	4 kali	29 kali	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Urusan Pilihan	Dinas Pertanian dan Peternakan
				Persentase Teknologi pertanian yang Diterapkan	12,5 %	100 %	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian tepat guna	Urusan Pilihan	Dinas Pertanian dan Peternakan
				Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	10 %	50 %	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Urusan Pilihan	Dinas Pertanian dan Peternakan
				Persentase penerapan teknologi peternakan	10%	50%	Program Penerapan Teknologi Peternakan	Urusan Pilihan	Dinas Pertanian dan Peternakan
				Persentase Penyakit Ternak yang Ditanggulangi	0 %	80 %	Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Urusan Pilihan	Dinas Pertanian dan Peternakan
				Panjang infrastruktur jalan pertanian yang terbangun	17 km	51 km	Pembangunan infrastruktur jalan pertanian	Urusan Pilihan	Dinas Pertanian dan Peternakan

BABVII-12

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (out come)	Capaian Kinerja		Prog. Pemb. Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
2.	Meningkatnya cadangan pangan	Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya lahan dan air secara lestari.	Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya lahan dan air secara lestari, dengan menetapkan skala prioritas kawasan pengembangan mendorong pola partisipatif, menggalang sinergi dan meningkatkan mutu koordinasi, pemberdayaan kelembagaan dan SDM pertanian.	Tingkat Penguatan Cadangan Pangan (%)	45	85	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan	Urusan Wajib	Badan Ketahanan Pangan Prov. Sultra
				Ketersediaan Informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah (%)	70	100			
				Cakupan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	65	95			
				Cakupan Penanganan daerah rawan pangan (%)	45	75			
				Jumlah Kelompok yang menjadi percontohan pengembangan teknologi budidaya	4 Klp	9 Klp	Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan)	Urusan Pilihan	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.	Meningkatnya produksi komoditi unggulan	Pengembangan pusat-pusat komoditi unggulan daerah	Peningkatan pengembangan ekonomi komoditi unggulan melalui inovasi dan produktivitas kerakyatan	Jumlah Komoditas yang ditangani dalam rangka Peningkatan produksinya	7 komoditi	25 komoditi	Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Urusan Pilihan	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
4.	Meningkatnya perdagangan dalam dan luar negeri	Mempromosikan hasil-hasil komoditi tanaman pangan dan peternakan	Mengembangkan sistem akses pemasaran komoditas pertanian	Nilai perdagangan antar pulau	4 trilyun	12 trilyun	Peningkatan efisiensi perdagannngan dalam negeri	Urusan Pilihan	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
				Volume ekspor	14 juta ton	60 juta ton	Program peningkatan perdagangan luar negeri	Urusan Pilihan	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
				Jumlah komoditi ekspor yang bersertifikasi SNI	5 komoditi	55 komoditi			
				cakupan penertiban pelaku usaha yang menerapkan tertib ukur	1711 orang	1711 orang	Program Perlindungan Konsumen	Urusan Pilihan	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
5.	Meningkatnya infrastruktur kelistrikan	Meningkatkan penyediaan infrastruktur energi kelistrikan	Meningkatkan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenaga listrik dan penyediaan pembangkit tenaga listrik mandiri	Terpenuhinya kebutuhan Bahan Bakar Minyak (KL)	91,557	1,820,211	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Minyak dan Gas Bumi	Urusan Pilihan	Dinas ESDM

BABVII-13

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (out come)	Capaian Kinerja		Prog. Pemb. Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Persentase rasio desa berlistrik	74,34	96	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Urusan Pilihan	Dinas ESDM
				Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (rasio elektrifikasi)	61,95	91	Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan	Urusan Pilihan	Dinas ESDM
6.	Meningkatnya industri kecil dan menengah besar	Pengembangan dan penguatan industri kecil, menengah, dan besar	Peningkatan kontribusi industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah	Jumlah industri kecil yang mengolah SDA daerah	6000 IKM	100 % (1200 IKM)	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.	Urusan Pilihan	Dinas Perindag Prov. Sultra
				Jumlah peserta terampil setelah mengikuti diklat.	240 orang	1.200 orang			
				Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan, penyuluhan, dan bimbingan oleh Tenaga Penyuluh, Fasilitator dan Shindanshi	81 IKM	405 IKM			
				Jumlah pelaku IKM yang menerapkan teknologi mesin dan peralatan	88 IKM	100 % (176 IKM)	Program peningkatan teknologi industri	Urusan Pilihan	Dinas Perindag Prov. Sultra
				Jumlah IKM yang menerapkan manajemen dan standard mutu	75 IKM	125 IKM	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Urusan Pilihan	Dinas Perindag Prov. Sultra
				Jumlah IKM yang difasilitasi pengembangan label danemasannya	20 IKM	150 IKM			
				Jumlah IKM yang difasilitasi memperoleh bantuan permodalan	49 IKM	200 IKM			
7.	Meningkatnya usaha koperasi dan UMKM serta wirausaha	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM	Pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi dan UKM	Persentase terciptanya iklim usaha UMKM yang kondusif	24,43 %	100%	Penciptaan iklim usaha KUMKM yang kondusif	Urusan Wajib	Dinas Koperasi

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BABVII-14



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (out come)	Capaian Kinerja		Prog. Pemb. Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
	baru			Persentase peningkatan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM	58,48 %	100%	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Urusan Wajib	Dinas Koperasi
				Persentase peningkatan daya saing UMKM	98,3 %	100%	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	Urusan Wajib	Dinas Koperasi
				Persentase peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	2,443 %	100%	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Urusan Wajib	Dinas Koperasi
8.	Meningkatnya investasi daerah	Meningkatnya jumlah investor usaha kecil menengah	Penciptaan iklim usaha yang kondusif dan peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Jumlah investor	42 Perusahaan	200 Perusahaan	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Urusan Wajib	BKPM & PTSP
		Menurunnya waktu pengurusan administrasi perizinan		Jumlah izin yang diterbitkan oleh BKPM dan PTSP Prov. Sultra	2 izin	800 Izin	Peningkatan pelayanan perizinan penanaman modal/investasi	Urusan Wajib	BKPM & PTSP
9.	Meningkatnya akses pembiayaan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembiayaan petani	Mendorong masyarakat dalam mengakses pembiayaan	Jumlah kelompok tani yang dilatih dan dibantu	0 klpk	35 klpk	Program peningkatan kesejahteraan petani	Urusan Pilihan	Dinas Pertanian dan Peternakan
10.	Meningkatnya kelembagaan masyarakat petani	Revitalisasi kelembagaan petani	Melanjutkan dan memantapkan kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat, antara lain : LEM Sejahtera	Cakupan pembinaan petani/pelaku agribisnis terkait upaya peningkatan kesejahteraan petani	5%	100 %	Program peningkatan kesejahteraan petani	Urusan pilihan	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
11.	Meningkatnya promosi daerah	Peningkatan promosi budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pemasaran yang kreatif dan efektif	Meningkatkan jumlah investasi industri skala besar di daerah melalui peningkatan informasi peluang investasi di sektor industri skala besar melalui penyusunan profil peluang investasi, pengembangan database potensi komoditi, pameran investasi di dalam dan luar negeri, penyediaan kawasan industri	Cakupan pembinaan pelaku usaha industri besar (agro, kimia, logam dan mesin)	50 pelaku usaha (8%)	652 pelaku usaha (100%)	Program penataan struktur industri	Urusan Pilihan	Dinas Perindag Prov. Sultra
				Jumlah IKM yang difasilitasi dan mengikuti promosi/ pameran di dalam, luar daerah maupun luar negeri	15 IKM	40 IKM	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Urusan Pilihan	Dinas Perindag Prov. Sultra
12.	Meningkatnya	Meningkatkan	Meningkatkan kualitas sumber	Produksi perikanan	148,8 ribu	167,6 ribu	Program	Urusan	Dinas Kelautan

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BABVII-15



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (out come)	Capaian Kinerja		Prog. Pemb. Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
	kesejahteraan petani dan nelayan	kualitas sumber daya manusia petani dan nelayan	daya manusia petani dan nelayan melalui pendidikan dan pelatihan	tangkap	ton	ton	pengembangan perikanan tangkap	Pilihan	dan Perikanan
				Produksi perikanan budidaya	744 ribu ton	2.003 ribu ton	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Urusan Pilihan	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum
				Benih unggul yang dihasilkan	400 juta ekor	600 juta ekor	Program pengembangan budidaya perikanan	Urusan Pilihan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Tingkat konsumsi ikan	50,60 kg/kap/th	58,09 kg/kap/th	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Urusan Pilihan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Jumlah unit pengolahan ikan (UPI)	630 unit	690 unit		Urusan Pilihan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Nilai tukar nelayan (NTN)	108,52%	184,500 %	Program peningkatan informasi sumber daya ikan;	Urusan Pilihan	Dinas Kelautan dan Perikanan, BPS Sultra
13.	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja	Memperluas kesempatan dan penyediaan lapangan kerja di perdesaan dan perkotaan	Peningkatan akses pencari kerja (angkatan kerja) terhadap lapangan kerja dan pengembangan informasi pasar kerja.	Persentase fasilitasi tenaga kerja untuk mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75%	90%	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Urusan Wajib	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Persentase peningkatan pencari kerja yang difasilitasi untuk mengakses kesempatan kerja	60%	90%	Peningkatan Kesempatan Kerja	Urusan Wajib	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14.	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Peningkatan iklim hubungan industrial yang kondusif	Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja termasuk norma kerja, serta norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk meningkatkan kesejahteraan dunia kerja dan menciptakan hubungan yang kondusif	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta pengawasan ketenagakerjaan	60%	90%	Pengembangan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja	Urusan Wajib	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15.	Meningkatnya	Pertumbuhan sektor	Peningkatan pendapatan	Royalty (Rp. 000)	17.033.581	258.510.638	Program peningkatan	Urusan	Dinas ESDM

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BABVII-16



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (out come)	Capaian Kinerja		Prog. Pemb. Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
	produksi dan produktifitas pertanian dan pertambangan	pertanian dan pertambangan	masyarakat dan pendapatan asli daerah melalui sektor pertanian dan pertambangan.	Landrent (Rp. 000)	1.023.969	42.272.524	penerimaan daerah bidang energi dan sumberdaya mineral	Pilihan	
				Penerimaan lain-lain (Rp. 000)	85.057.846	108,685,455			
				Reklamasi lahan pasca tambang (ha)	111	535.06	Program Pembinaan Teknis dan Lingkungan Kegiatan Usaha Pertambangan	Urusan Pilihan	Dinas ESDM
				Pembukaan lahan untuk kegiatan pertambangan (ha)	324,73	1,388.66			
				Berkurangnya Tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan pertambangan (%)	-	45%			
				Peningkatan status IUP dari IUP Ekspl.menjadi IUP operasi produksi (izin)	49 izin	110 izin	Program pembinaan dan pengawasan perusahaan pertambangan	Urusan Pilihan	Dinas ESDM
				Meningkatnya Kepatuhan Pemegang IUP dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan (%)	-	90			
				Pertemuan tahunan pengelola energi dan sumber daya mineral se sulawesi tenggara (paket)	1	7	Program peningkatan paduserasi kebijakan dan program pembangunan bidang ESDM	Urusan Pilihan	Dinas Kehutanan
16.	Meningkatnya pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan	Pengendalian dan pengawasan hutan	Pemanfaatan sumberdaya hutan secara profesional	Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (unit KPH)	2 unit	14 unit	Program perencanaan dan pengembangan hutan	Urusan Pilihan	Dinas Kehutanan
				Fasilitasi Pemberian Izin/ Rekomendasi/ Pertimbangan Teknis/Evaluasi (izin)	20 %	100 %		Urusan Pilihan	Dinas Kehutanan

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BABVII-17



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (out come)	Capaian Kinerja		Prog. Pemb. Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk menurunkan luas hutan dan lahan kritis (Ha)	20.000 ha	40.725 Ha	Program rehabilitasi hutan dan lahan Program	Urusan Pilihan	Dinas Kehutanan
				Persentase Peningkatan Pemanfaatan Potensi SDH (%)	39,398 m3	158,577 m3	Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan	Urusan Pilihan	Dinas Kehutanan
				Jumlah Industri Hasil hutan yang melakukan penatausahaan hasil hutan dengan baik dan tertib	8 unit	52 unit	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Urusan Pilihan	Dinas Kehutanan
				Fasilitasi (Ha): IUPHHK-HTI IUPHHK-HTR IUPHHK-HKM IUPHHK-HD	0 20 0 0	2 25 20 10	Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan	Urusan Pilihan	Dinas Kehutanan
				Presentase peningkatan perlindungan dan konservasi SDH (%)	13,43 %	29 %	Program perlindungan dan konservasi hutan	Urusan Pilihan	Dinas Kehutanan
				Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kehutanan yang Akurat dan Terkini yang dapat di Akses secara Luas (%)	5 %	100 %	Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDH dan LH	Urusan Pilihan	Dinas Kehutanan
17.	Meningkatnya pariwisata daerah	Mengembangkan keunggulan dan daya tarik wisata potensial untuk meningkatkan daya saing wisata	Pengembangan daerah tujuan dan produk wisata (Alam dan budaya, usaha ekonomi kreatif serta peningkatan promosi wisata)	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	8.547.551 org	13.161.740 org	Pengembangan pemasaran pariwisata	Urusan Pilihan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				Jumlah Destinasi Pariwisata yang Mengalami Peningkatan Daya Saing	5 lokasi	9 lokasi	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Urusan Pilihan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BABVII-18



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (out come)	Capaian Kinerja		Prog. Pemb. Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Cakupan Pelaku Kreatif yang mengalami peningkatan kemampuan Kreasi dan Produksi	20 event	24 keg	Program pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni budaya, media desain dan IPTEK	Urusan Pilihan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



7.2. Kebijakan Umum dan Program Revitalisasi Pemerintahan Daerah

7.2.1. Reformasi Birokrasi ;

Ditujukan untuk mengembangkan pengelolaan elemen-elemen dasar pemerintahan melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengelolaan elemen-elemen dasar pemerintahan dimaksud meliputi :

- **Urusan Pemerintahan** ; kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berdasarkan UU 32 tahun 2004, dengan tiga kriteria yaitu : eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Salah satu fokus kebijakan dalam penyerahan kewenangan pemerintahan adalah penyerahan kewenangan ke tingkat kecamatan dan desa, terutama yang berhubungan dengan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
- **Kelembagaan** ; kewenangan tidak mungkin dapat dilaksanakan jika tidak diakomodasi dalam kelembagaan. Ada dua jenis kelembagaan yang membentuk pemerintahan daerah yaitu kelembagaan untuk pejabat politik meliputi kelembagaan kepala daerah dan DPRD serta kelembagaan untuk pejabat karir yang terdiri dari perangkat daerah (dinas, badan, kantor, sekretariat, kecamatan dan kelurahan). Dalam rangka mengembangkan pelayanan kepada masyarakat maka fokus dalam pengembangan kelembagaan adalah 1) mengintegrasikan fungsi-fungsi pelayanan yang bersifat legislasi dan pelayanan administrasi pemerintah, 2) mengembangkan kelembagaan kecamatan dan desa/kelurahan sehingga mampu mengakomodasi kewenangan yang didesentralisasikan ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
- **Personil** ; tersedianya personil untuk mengelola dan menggerakkan kelembagaan dalam menjalankan kewenangan, terutama di kecamatan dan desa/kelurahan yang juga merupakan salah satu fokus pengelolaan kegiatan-kegiatan masyarakat. Sejalan dengan itu maka pengembangan kapasitas aparat pemerintah di kecamatan dan desa/kelurahan akan ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dalam rangka pengembangan sektor-sektor ekonomi masyarakat di kecamatan dan desa/kelurahan.
- **Pelayanan Publik** ; hasil akhir dari proses pemerintahan yaitu tersedianya *goods* dan *services* yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam konteks ini maka **pertama** pemerintah daerah harus dapat menyediakan *public goods* yaitu barang untuk kepentingan masyarakat seperti jalan, jembatan, irigasi, gedung sekolah, pasar, terminal, rumah sakit dan sebagainya. Pelayanan pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan *public goods* merupakan bagian dari upaya pengembangan infrastruktur dasar untuk mendukung pembangunan sosial ekonomi terutama dalam pengembangan ekonomi masyarakat. **Kedua** difokuskan pada pemberian *public services* yaitu pengurusan perizinan dan pelayanan administrasi pemerintahan. Sistem pelayanan prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan menjadi fokus perhatian karena diharapkan melalui pelayanan yang baik akan tercipta iklim investasi dan iklim berusaha yang lebih kondusif.
- **Pengawasan** ; ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Bentuk-bentuk pengawasan meliputi : pengawasan internal, pengawasan eksternal, pengawasan sosial/masyarakat dan pengawasan melekat. Dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka peningkatan pengawasan oleh masyarakat akan ditingkatkan dan akan menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

7.2.2. Reformasi Keuangan Daerah

Salah satu prinsip yang akan digunakan dalam reformasi keuangan daerah adalah berdasarkan prinsip *money follows function*. Daerah harus diberikan sumber-sumber keuangan



yang berasal dari pajak dan retribusi (desentralisasi fiskal) maupun sumber-sumber dari dana perimbangan (subsidi dan bagi hasil).

○ **Desentralisasi fiskal ke tingkat kecamatan dan desa**

Penataan keuangan ditujukan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada kecamatan dan desa untuk mengelola dana pembangunan baik dalam bentuk hibah (*block grant*) maupun bantuan program (*specific grant*). Tujuannya agar kecamatan dan desa/kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat memberikan pelayanan yang optimal serta mampu mendorong pembangunan diwilayahnya masing-masing. Hal ini sejalan dengan reformasi birokrasi yang akan dilakukan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan yaitu dengan membenahi dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparat desa/kelurahan melalui desentralisasi kewenangan.

Dengan demikian bukan saja kelembagaan dan aparat serta kewenangan yang diturunkan ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, tetapi juga kewenangan pengelolaan keuangan dalam bentuk *block grant (open menu)* kepada kecamatan dan desa/kelurahan.

Demikian pula dengan program bantuan instansi sektoral ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan akan dilakukan secara sinergi dengan program-program di tingkat kabupaten dan kota. Pemerintah provinsi hanya menetapkan besaran bantuan dalam bentuk program dan kegiatan untuk disinkronkan dengan program dan kegiatan kabupaten/kota, di mana bantuan program dari pemerintah provinsi disesuaikan dengan lokasi-lokasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Ini dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih program dan kegiatan antara provinsi dan kabupaten/kota tetapi juga sekaligus mendorong sasaran pembangunan yang lebih besar kepada masyarakat di Kecamatan dan kelurahan.



7.2.2.1. Kebijakan Umum dan Program Revitalisasi Pemerintahan Daerah

Tabel 138. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi Revitalisasi Pemerintahan Daerah

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator kinerja (<i>outcome</i>)	Capaian Kinerja		Prog. Pemb. Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1.	Meningkatnya fungsi kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan yang efektif	Peningkatan Kapasitas dan kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan	Peningkatan kapasitas dan kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur dan manajerial pemerintahan desa/kelurahan	Persentase sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya	100%	100%	Peningkatan kapasitas SDM aparatur Desa/Kelurahan	Urusan Wajib	BPMPD
				Cakupan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah tingkat provinsi dan nasional	1 keg	1 keg	Peningkatan Peran dan Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Urusan Wajib	BPMPD
		Peningkatan SDM aparat desa/kelurahan	Peningkatan SDM aparat desa/kelurahan melalui penjenjangan pendidikan, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan	Persentase peningkatan mutu pelatihan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan	100%	100%	Peningkatan mutu pelatihan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan	Urusan Wajib	BPMPD
		Peningkatan sarana prasarana kelembagaan desa/kelurahan	Peningkatan sarana prasarana kelembagaan desa/kelurahan melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur desa/kelurahan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	100%	100%	Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Urusan Wajib	BPMPD
				Persentase aparat desa/kelurahan yang mengikuti pelatihan kelembagaan	50 org	200 org	Pelatihan Kelembagaan Desa/Kelurahan	Urusan Wajib	BPMPD
		Pengembangan regulasi kelembagaan desa/kelurahan	Pengembangan regulasi kelembagaan desa/kelurahan melalui fasilitasi pengembangan peraturan desa/kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang menyusun peraturan desa/kelurahan	30 desa/kel	200 desa/kel	Program pengembangan peraturan desa/kelurahan	Urusan Wajib	BPMPD
		Meningkatkan kapasitas SDM Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan pasar desa	Meningkatkan kapasitas SDM Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pasar desa melalui pengembangan	Jumlah aparat pengelola BUMDes yang terlatih	183 orang	645 orang	Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Ekonomi	Urusan Wajib	BPMPD



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator kinerja (<i>outcome</i>)	Capaian Kinerja		Prog. Pemb. Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			pendidikan dan pelatihan						
		Meningkatkan kapasitas Lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan pasar desa	Meningkatkan kapasitas lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pasar desa melalui pengembangan sarana prasarana ekonomi desa, sistem informasi manajemen BUMDes	Cakupan sarana dan prasarana ekonomi desa yang dikembangkan	133 pasar	250 pasar	Pengembangan sarana dan prasarana ekonomi desa	Urusan Wajib	BPMPD
				Cakupan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa	0	100%	Pengembangan Ekonomi Perdesaan	Urusan Wajib	BPMPD
		Peningkatan SDM aparat desa/kelurahan	Peningkatan SDM aparat desa/kelurahan melalui penjurangan pendidikan, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan	Persentase aparat desa/kelurahan yang mengikuti pelatihan kelembagaan	50 orang	200 orang	Pelatihan Kelembagaan desa/kelurahan	Urusan Wajib	BPMPD
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah	Menetapkan pedoman APBD	Peningkatan prasarana dan sarana penunjang serta dukungan alokasi biaya yang memadai	Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Urusan Wajib	BPKAD
				Persentase pembinaan dan fasilitasi pengelola keuangan kabupaten/kota	100%	100%	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota	Urusan Wajib	BPKAD
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian secara terpadu antar lintas SKPD	Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta sinergi perencanaan pembangunan antar dan lintas SKPD	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terlaksana	100%	100%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Urusan Wajib	BAPPEDA Biro Organisasi
4.	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan internal pemerintah daerah	Membuka layanan konsultasi	Menjadi mitra SKPD Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota dalam rangka asistensi dan konsultasi	Persentase pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan & kinerja secara efektif dan alami yang terlaksana	100%	100%	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Urusan Wajib	Inspektorat
		Monitoring dan Evaluasi Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan Internal dan Eksternal	Menjadikan Pemaparan Penyelesaian Tindak Lanjut menjadi agenda tetap						

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BABVII-23



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator kinerja (<i>outcome</i>)	Capaian Kinerja		Prog. Pemb. Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		Pengembangan Profesi Pengawas Fungsional	Mengembangkan Kompetensi Aparat Pengawas Bersertifikat melalui Penjenjangan Diklat Fungsional	Cakupan aparatur yang bersih, berkompeten, dan berkualitas	40 orang	95 orang	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Urusan Wajib	Inspektorat
		Pengembangan karier Pegawai Inspektorat	Mengembangkan Sumber Daya Aparatur dengan sistem pembinaan karier yang terbuka						
5.	Meningkatkan penegakan peraturan perundang-undangan daerah	Membangun kesamaan pemahaman, pandangan dan komitmen bagi jajaran satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan operasi lapangan	Peningkatan disiplin, pendidikan dan pelatihan serta rekrutment personil satuan polisi pamong praja	Cakupan persentase petugas dalam memelihara kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal yang memenuhi syarat	31%	85%	Pemeliharaan ketenteraman ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	Urusan Wajib	Sat.Pol.PP,dan Polda Sultra
				Persentase pelaksanaan operasi yustisi	100%	100%	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)		
6.	Meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai serta sistem promosi dan rekrutmen pegawai	Penempatan, pengembangan dan pemberdayaan aparatur sesuai potensi dan kompetensi pegawai negeri sipil	Pengembangan sumber daya manusia aparatur melalui diklat jabatan, fungsional dan teknis serta promosi jabatan struktural dan fungsional	Presentase Jumlah komponen kediklatan yang menunjang terciptanya sistem penyelenggaraan diklat yang baik	50 %	90 %	Program Pengkajian dan Pengembangan Kediklatan	Urusan Wajib	Badan Pendidikan dan Pelatihan,
				Persentase Pengelola, Penyelenggara, maupun Pengajar Diklat Berkualitas yang tersedia	50%	100%	Program Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Penyelenggara Diklat		
				Persentase peningkatan kompetensi widyaiswara dalam pembelajaran	50%	100%	Program Peningkatan Kompetensi Widyaiswara Dalam Pembelajaran Diklat Aparatur		
				Presentase Jumlah Lulusan Diklat Struktural,	60 %	90 %	Program Peningkatan kapasitas		

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BABVII-24



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator kinerja (<i>outcome</i>)	Capaian Kinerja		Prog. Pemb. Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Tekhnis & Fungsional			sumberdaya aparatur		dan Pelatihan,
		Meningkatkan pembinaan dan pemahaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pemberian sanksi dan reward kepada pegawai negeri sipil yang indiscipliner dan berprestasi	Cakupan peningkatan Pengelolaan Pelayanan Pegawai	12 bln	12 bln	Program Pengelolaan Peningkatan Pelayanan Pegawai	Urusan Wajib	Biro Organisasi
				Cakupan SDM yang berkualitas dan profesional dalam menjalankan tugas	100%	100%	Program Pendidikan Kedinasan	Urusan Wajib	Badan Kepegawaian Daerah
					100%	100%	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	Urusan Wajib	Badan Kepegawaian Daerah
7.	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Politik dan Suprastruktur Politik	Struktur politik dan infrastruktur politik dan suprastruktur politik	Terlaksananya peningkatan kualitas infrastruktur politik dan suprastruktur politik	Persentase Pendidikan Politik Masyarakat.	100%	100%	Program pendidikan politik masyarakat	Urusan wajib	Badan kesbangpol Prov Sultra
		Optimalkan penguatan nilai – nilai ideologi negara dan wawasan kebangsaan	Terlaksananya penguatan nilai - nilai ideologi negara dan wawasan kebangsaan	jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kesadaran masyarakat	100%	100%	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Urusan wajib	Badan kesbangpol Prov. Sultra
				Persentase Kemitraan Wawasan Kebangsaan	100%	100%	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Urusan wajib	Badan kesbangpol Prov. Sultra
8.	Meningkatnya sistem pengawasan isi siaran	Meningkatkan sistem pengawasan isi siaran terhadap siaran radio dan televisi	Mengembangkan kerjasama pengawasan isi siaran di kab/Kota melalui koordinasi, kemitraan dan sosialisasi dengan masyarakat	Cakupan Tahapan proses perizinan lembaga penyiaran dan sosialisasi perizinan di Kab/Kota yang terlaksana	100%	100%	Program peningkatan kualitas lembaga penyiaran	Urusab Wajib	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
		Mengembangkan sistem pengawasan isi siaran	Meningkatkan sistem pengawasan isi siaran terhadap siaran radio dan televisi melalui pemantauan isi siaran radio dan televisi secara rutin	Cakupan kelompok pemantau siaran, sosialisasi P3-SPS, FGDs, Literasi Media, dan penganugerahan KPI Sultra Award yang dibentuk	100%	100%	Program peningkatan kualitas isi siaran	Urusab Wajib	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

BABVII-25

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator kinerja (<i>outcome</i>)	Capaian Kinerja		Prog. Pemb. Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		Mengembangkan kerjasama pengawasan isi siaran di kab/Kota	Meningkatkan koordinasi dengan mitra di kab/kota melalui rapat koordinasi dan rapat kerja	Cakupan Rakor dan Raker bidang penyiaran yang terlaksana.	100%	100%	Program penguatan kelembagaan KPID	Urusab Wajib	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
9.	Meningkatnya peran DPRD dalam pelaksanaan perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah	Meningkatkan kapasitas SDM legislatif sesuai dengan fungsinya	Peningkatan kapasitas anggota legislatif beserta kelembagaannya secara berkelanjutan	Cakupan terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	100%	100%	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Urusan Wajib	Sekretariat DPRD



7.4. Kebijakan Umum dan Program Memantapkan Pembangunan Budaya Daerah

Sulawesi Tenggara dikenal dengan keragaman dan keunikan budaya yang tersebar di kabupaten dan kota, bahkan hingga di beberapa komunitas tertentu memiliki budaya dengan ciri tersendiri. Kondisi seperti ini tentu saja merupakan potensi pembangunan terutama dalam rangka mempererat persatuan dan kesatuan serta merupakan salah satu potensi pariwisata dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat.

7.4.1. Pengembangan Kerajinan Rakyat

Peningkatan keterampilan dan kemampuan untuk menciptakan desain terhadap kerajinan rakyat akan menjadi satu sasaran pengembangan dan peningkatan produk budaya Sulawesi Tenggara, seperti tenunan, kerajinan perak dan emas serta desain busana dengan bahan tenun tradisional.

7.4.2. Halo Sultra

Sebagai salah satu ajang aktualisasi seni budaya Sulawesi Tenggara, akan terus dikembangkan dan diperluas baik materi kegiatan maupun skala kewilayahannya.

7.4.3. Pengembangan Situs Budaya dan Daerah Tujuan Wisata

Pengembangan situs budaya dan daerah tujuan wisata seperti keraton, benteng, tempat-tempat bersejarah dan lokasi wisata alam akan terus direvitalisasi guna mendorong pengembangan pariwisata daerah, baik wisata budaya maupun wisata alam.

Gerakan pembangunan karakter bangsa melalui kebudayaan merupakan upaya penanaman dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya kepada generasi muda, budaya tersebut berasal dari kearifan lokal dan budaya bangsa melalui berbagai media sosial termasuk media pendidikan baik pendidikan formal di sekolah-sekolah maupun pendidikan non formal di luar lingkungan sekolah.



**Tabel 139. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Misi Pembangunan Kebudayaan**

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (out come)	Capaian Kinerja		Prog. Pemb. Daerah	Bidang Urusan	SKPD P.Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1.	Menguatnya budaya dan tradisi lokal	Penelusuran nilai-nilai seni dan situs budaya daerah	Menelusuri nilai-nilai seni budaya daerah melalui pengkajian dan dialog seni budaya	Dokumentasi keragaman budaya	-	15 paket	Pengelolaan keragaman budaya daerah	Urusan Wajib	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Badan Penelitian dan Pengembangan
				Frekuensi kajian	-	3 kali pertahun		Urusan Wajib	
			Menelusuri situs budaya daerah melalui restorasi dan publikasi	Identifikasi dan pendataan situs budaya	-	100%	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Urusan Wajib	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata,
		Menggali dan memperkenalkan kearifan lokal dan budi pekerti bangsa	Menggali kearifan lokal dan budi pekerti bangsa melalui kajian dan pengembangan <i>folklore</i>	Identifikasi dan pendataan periwayar / pencerita	0	70 Orang	Program Pelestarian Budaya	Urusan Wajib	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata,
				Dokumentasi kearifan lokal dan budi pekerti bangsa	-	Updating data satu kali setahun		Urusan Wajib	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata,
		Mengkaji dan mengintegrasikan pendidikan karakter bangsa dan nasionalisme	Mengkaji dan mengintegrasikan karakter bangsa dan nasionalisme melalui kurikulum sekolah dan perguruan tinggi serta penguatan lembaga adat	Persentase muatan lokal dalam kurikulum	15%	60%	Program Pengembangan Nilai Budaya	Urusan Wajib	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,



7.5. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan dan Kawasan Strategis.

7.5.1. Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan

Pembangunan infrastruktur kewilayahan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi elemen dasar pemerintahan untuk memberikan pelayanan publik berupa penyediaan sarana dan prasarana umum (*public goods*) seperti jalan, jembatan, dermaga, rumah sakit, pasar, pergudangan dan lain-lain. Penyediaan *public goods* seperti jalan, jembatan, terminal, dermaga dan pergudangan, disinkronkan dengan upaya-upaya pelayanan pemerintahan dan juga untuk mendukung pengembangan Kawasan Strategis dalam mendukung ekonomi masyarakat dan pengembangan investasi.

Dengan demikian prioritas pembangunan sarana prasarana kewilayah ditetapkan berdasarkan prioritas pengembangan sektor-sektor produksi seperti pusat-pusat pemukiman masyarakat, sentra-sentra produksi pertanian, kawasan-kawasan tumbuh cepat, *outlet* komoditas dan lain-lain.

7.5.2. Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Terpadu Ditingkat Wilayah

Untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat maka penyediaan transportasi secara terpadu yaitu interkoneksi antara moda dan ukuran moda akan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi. Jenis-jenis moda angkutan harus ditata sedemikian rupa sehingga dapat mendukung satu dengan lainnya dalam mendukung kelancaran arus barang, penumpang dan jasa serta dalam menciptakan simpul-simpul tata niaga. Demikian pula dengan ukuran moda angkutan harus disesuaikan berdasarkan kebutuhan sehingga secara ekonomi menguntungkan dan juga mampu untuk memperlancar angkutan penumpang, barang dan jasa.

Sejalan dengan pengembangan moda angkutan secara terpadu, pembangunan sarana prasarana pendukung seperti pergudangan, terminal dan dermaga juga menjadi prioritas dalam rangka mendukung pembentukan simpul-simpul tata niaga seperti diuraikan terdahulu. Pembangunan sarana pendukung tingkat wilayah sebagaimana dimaksud disinkronkan dengan rencana pengembangan sentra-sentra produksi dan kawasan tumbuh cepat yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

7.5.3. Pembangunan Sarana Prasarana Telekomunikasi Dan Telecentre, Untuk Pelayanan Pemerintahan Dan Perekonomian

Globalisasi dalam hubungan pemerintahan dan ekonomi (perdagangan) menuntut tersedianya sistem informatika dan telekomunikasi secara lebih merata. Dewasa ini pengembangan sistem informatika hingga ke desa-desa secara teknis tidak ada lagi hambatan, karena cukup tersedia sumberdaya energi listrik dalam berbagai bentuk, demikian juga dengan teknologi informatika. Bila dikaitkan dengan pengembangan pendidikan menengah maka sekolah-sekolah menengah yang berada di kecamatan dapat dijadikan sebagai pusat-pusat informasi terutama untuk pengembangan ekonomi dalam bentuk telecentre atau BDS (*business development centre*) dan lain-lain.

7.5.4. Pembangunan Sumberdaya Air

Pembangunan Sumberdaya air ditujukan untuk penyediaan air baku, sarana prasarana irigasi, tambak, rawa pengamanan pantai dan pengendali banjir. Penyediaan air baku selain dalam rangka mendukung terpenuhinya kebutuhan air baku untuk air minum juga air baku untuk memenuhi kebutuhan pertanian. Pengelolaan prasarana irigasi yang sudah ada serta pengembangannya ditujukan untuk mendukung swasembada pangan. Di samping itu konservasi sumberdaya air ditujukan agar potensi sumberdaya air yang ada tetap terjaga kelestariannya.

7.5.5. Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi Dan Air Minum

Air minum bagi masyarakat di desa maupun di kota merupakan kebutuhan yang sangat esensial. Selain air minum dibutuhkan untuk konsumsi sehari-hari, ketersediaan air minum juga



berkaitan dengan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh konsumsi air yang tercemar seperti diare termasuk dalam 10 penyakit utama yang diderita masyarakat. Oleh karena itu salah satu prioritas pembangunan dalam lima tahun ke depan adalah mempercepat penyediaan air minum hingga ke desa-desa. Penyediaan dan pengelolaan prasarana sanitasi terkait erat dengan derajat kesehatan masyarakat. Prasarana sanitasi seperti prasarana pengelolaan sampah, prasarana drainase dan prasarana pengelolaan air limbah dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan lingkungan.

7.5.6. Pembangunan Energi Alternatif, Dengan Mamanfaatkan Tenaga Air, Surya, Angin Dan Panas Bumi

Dari banyak hasil penelitian diketahui bahwa energi listrik memiliki peranan yang sangat besar dalam mendukung aktivitas manusia, baik sebagai penerang, penggerak ekonomi, pelayanan pendidikan dan kesehatan serta dalam pengembangan teknologi informatika dan komunikasi. Ketersediaan energi listrik dengan menggunakan mesin diesel saat ini merupakan salah satu pilihan utama, walau bahan bakar minyak saat ini cukup langka dan mahal terutama di desa-desa. Oleh karena itu penggunaan energi alternatif merupakan alternatif yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Pembangkit energi skala kecil untuk mendukung aktivitas masyarakat dengan menggunakan sumberdaya terdekat seperti tenaga air (*micro-hydro*), tenaga angin dan tenaga surya perlu dikembangkan mengingat sumberdaya seperti disebutkan itu cukup tersedia setiap saat. Yang perlu dipikirkan adalah penyediaan tenaga pengelola dan sarana pendukungnya.

Pembangunan energi listrik dalam lima tahun ke depan terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di desa-desa akan menjadi prioritas dalam membangun kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.

7.5.7. Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Strategis

Untuk mendukung upaya peningkatan nilai tambah sumberdaya alam maka akan dikembangkan kawasan strategis ekonomi terutama yang terkait dengan ketersediaan potensi sumberdaya alam. Pembangunan sarana prasarana kawasan strategis juga ditujukan untuk mendukung kebijakan Pemerintah tentang *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Ekonomi Inonesia (MP3EI). Pada periode Tahun 2008-2013 telah dirancang beberapa kawasan strategis yang potensial untuk meningkatkan nilai tambah secara signifikan yaitu kawasan pertambangan Asera, Wiwirano dan Langgikima (AWILA), kawasan pertambangan Kolaka Utara, Kawasan Pertambangan Watekule Kabaena Bombana, Kawasan Industri Kakao di Ladongi Kolaka, Kawasan Industri Rumpit Laut di Baubau dan Buton serta kawasan Industri Pariwisata di Wakatobi.

Kawasan-kawasan ini diharapkan mampu menjadi pemicu terhadap pembangunan masyarakat dan daerah sekitar melalui proses peningkatan nilai tambah.

7.5.8. Pembangunan Sarana Prasarana Desa Dan Kecamatan

Salah satu upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan dan masyarakat miskin perkotaan adalah dengan memberikan pelayanan yang nyata dan berdimensi pemberdayaan. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung merupakan salah satu kendala berkembangnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Sesuai dengan komitmen membangun masyarakat di pedesaan maka pengembangan sarana prasarana desa dan kecamatan ditujukan untuk memberikan akses yang lebih besar dan merata terhadap sentra produksi, sentra pengolahan dan pasar. Salah satu cara yang akan ditempuh adalah dengan mengembangkan ibu kota kecamatan sebagai pusat-pusat pertumbuhan atau kawasan strategis cepat tumbuh.



**Tabel 140. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Misi Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan dan Kawasan Strategis.**

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>outcome</i>)	Capaian Kinerja		Prog. Pemb. Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1.	Meningkatnya pelayanan dan pembangunan prasarana transportasi darat, laut dan udara	Pembangunan jaringan jalan dan jembatan baru dalam kawasan strategis dan lintas strategis	Pembangunan jaringan jalan baru melalui perintisan dan pembangunan jalan dan jembatan baru (Jembatan teluk Kendari, Pulau Muna-Pulau Buton)	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	65%	75%	Pembangunan jalan dan Jembatan	Urusan Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
		Peningkatan kondisi jalan rusak dan sangat rusak	Peningkatan kondisi jalan melalui percepatan pengembangan dan pemeliharaan jalan pada pusat-pusat kegiatan dan kawasan strategis provinsi	Persentase jalan dan jembatan yang terpelihara	65%	95%	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan Jembatan	Urusan Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
		Peningkatan kondisi jembatan	Peningkatan kondisi jembatan melalui pemeliharaan, peningkatan kondisi jembatan						
		Mengembangkan sarana prasarana transportasi dasar	Mengembangkan sarana prasarana transportasi dasar melalui pengembangan fasilitas angkutan jalan dan angkutan penyeberangan	Persentase pengembangan fasilitas angkutan jalan	65%	87%	Pengembangan fasilitas angkutan jalan	Urusan Wajib	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
				Persentase pengembangan fasilitas angkutan laut	65%	100%	Program pengembangan fasilitas angkutan Laut		
				Persentase peningkatan sarana dan prasarana terminal bandar udara	65%	80%	Program peningkatan sarana Prasarana Terminal Bandar Udara		
				Persentase pengendalian dan pengamanan lalu lintas	65%	95%	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas		
				Persentase peningkatan pelabuhan penyeberangan	65%	85%	Peningkatan pelabuhan penyeberangan		
				Persentase rehabilitasi sarana dan prasarana LLASDP	60%	95%	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLASDP		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (out come)	Capaian Kinerja		Prog. Pemb. Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		Mengembangkan infrastruktur secara terpadu pada kawasan strategis	Mengembangkan infrastruktur pada kawasan strategis melalui pengembangan infrastruktur terpadu pada kawasan strategis	Persentase pengembangan infrastruktur secara terpadu pada kawasan strategis	0%	65%	Pengembangan infrastruktur secara terpadu pada kawasan strategis	Urusan Wajib	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Mengembangkan sarana prasarana transportasi darat, laut, dan udara	Mengintegrasikan pelayanan administrasi perizinan perhubungan ke dalam PTSP melalui debirokratisasi dan koordinasi pelayanan	Persentase jumlah izin melalui PTSP	0%	70%	Program pelayanan administrasi perizinan terpadu	Urusan Wajib	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
				Persentase debirokratisasi	0%	100%			
		Mengembangkan sistem pelayanan prima jasa perhubungan darat, laut, dan udara	Mengembangkan sistem pelayanan prima jasa perhubungan melalui penetapan standar pelayanan angkutan, meningkatkan disiplin pelayanan pada fasilitas angkutan	Jumlah unit fasilitas angkutan penyeberangan yang tersedia	13 unit	21 unit	Program pengembangan fasilitas angkutan penyeberangan	Urusan Wajib	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
				Persentase peningkatan pelayanan angkutan	60%	90%	Program peningkatan pelayanan angkutan		
2.	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana jaringan irigasi	Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana melalui pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.	Persentase Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya yang terlaksana	65%	95%	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.	Urusan Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
		Pembangunan sarana dan prasarana baru dalam pengelolaan sumberdaya air	Pembangunan sarana dan prasarana baru dalam pengelolaan sumberdaya air melalui pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya	Cakupan penyediaan dan pengelolaan air baku yang terpenuhi	1 kaw	6 kaw	Penyediaan dan pengelolaan air baku		
				Persentase Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya yang terlaksana	65%	95%	Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya		
				Cakupan wilayah sungai berpotensi banjir yang dikendalikan	43 lokasi	346 lokasi	Pengendalian banjir		

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BABVII-32



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (out come)	Capaian Kinerja		Prog. Pemb. Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
3.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi	Peningkatan penyediaan air minum di kawasan perkotaan dan perdesaan	Peningkatan penyediaan air minum melalui pengembangan jaringan perpipaan dan non perpipaan	Persentase kinerja pengelolaan air minum dan air limbah yang dikembangkan	65%	95%	Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Urusan Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
		Peningkatan pelayanan jaringan air limbah di kawasan perkotaan dan perdesaan	Peningkatan penyediaan air minum melalui pengembangan jaringan perpipaan dan non perpipaan	Persentase kinerja pengelolaan air minum dan air limbah yang dikembangkan	65%	95%	Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Urusan Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
		Peningkatan pengelolaan fasilitas persampahan di kawasan perkotaan	Peningkatan pengelolaan fasilitas persampahan melalui pengurangan sampah dan penanganan sampah perkotaan	Fasilitas pengurangan sampah perkotaan	65%	90%	Pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan	Urusan Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
		Pengurangan luasan genangan di kawasan perkotaan	Pengurangan luasan genangan di kawasan perkotaan melalui penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota.	Persentase Layanan Sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota.	65%	90%	Pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan	Urusan Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
		Penataan kawasan permukiman di kawasan perkotaan	Penataan kawasan permukiman perkotaan melalui penyediaan sarana dan prasarana kawasan permukiman	Persentase pengurangan luasan permukiman kumuh	65%	90%	Pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan	Urusan Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
		Peningkatan infrastruktur bangunan gedung dan lingkungan	Peningkatan infrastruktur bangunan Pemda melalui pembangunan gedung dan fasilitas umum	Cakupan bangunan kantor dan gedung pemda yang terbangun/ter rehabilitasi	1 unit	6 unit	Program Pemb/Rehab/Peningkatan kantor dan gedung	Urusan Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
4.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penyelenggaraan jasa konstruksi	Peningkatan tertib pengawasan, klasifikasi dan kualifikasi jasa konstruksi	Mewujudkan jasa konstruksi yang profesional melalui pembinaan pengawasan terhadap pelaku jasa konstruksi	Cakupan pemberdayaan jasa konstruksi yang terlaksana	2 keg	257 keg	Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Urusan Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
5.	Optimalisasi penyelenggaraan penataan ruang	Percepatan penyelesaian dokumen tata ruang	Percepatan penyelesaian dokumen tata ruang melalui peningkatan koordinasi antar sektor dan wilayah, pengembangan sumberdaya manusia	Persentase perencanaan tata ruang yang terlaksana	65%	95%	Program Perencanaan Tata Ruang	Urusan Wajib	Bappeda Prov. Sultra
				Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Wilayah	60%	100%	Perencanaan tata ruang Wilayah	Urusan Wajib	Bappeda Prov. Sultra
				Persentase Dokumen RTRW Provinsi dan Kab. Kota yang tersedia	60%	100%	Penyusunan Dokumen RTRW Provinsi dan Kab/ Kota	Urusan Wajib	Bappeda Prov. Sultra

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BABVII-33



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (out come)	Capaian Kinerja		Prog. Pemb. Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Jumlah Dokumen Rrencana Detail Tata Ruang Wilayah	0	2 Dok	Program Penyusunan Detail Tata Ruang Wilayah	Urusan Wajib	Bappeda Prov. Sultra
				Jumlah dokumen peta tematik yang tersedia	0	4 dok	Program Pengembangan Peta Tematik	Urusan Wajib	Bappeda Prov. Sultra
				Jumlah dokumen pelaksanaan Monitoring Kesesuaian Ruang dengan RTRW	0	4 dok	Program Monitoring Kesesuaian Ruang dengan RTRW	Urusan Wajib	Bappeda Prov. Sultra
		Penataan kawasan strategis	Penataan kawasan strategis melalui penyusunan rencana detail tata ruang	Persentase penyusunan rencana detail tata ruang	65%	95%	Program Perencanaan Tata Ruang	Urusan Wajib	Dinas Pekerjaan Umum,
		Penataan kawasan lindung dan budidaya	Penataan kawasan lindung dan budidaya melalui koordinasi antar sektor dan wilayah	Cakupan koordinasi antar sector dan wilayah dalam pemanfaatan ruang	6 keg	36 keg	Program Pemanfaatan Ruang	Urusan Wajib	Dinas Pekerjaan Umum,
		Peningkatan sumberdaya manusia tata ruang	Peningkatan sumberdaya manusia tata ruang melalui pendidikan dan pelatihan	Cakupan sumberdaya manusia tata ruang yang mengikuti diklat	20 org	28 org	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Urusan Wajib	Dinas Pekerjaan Umum,
		Peningkatan sistem pengawasan tata ruang	Peningkatan sistem pengawasan tata ruang melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi tata ruang	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang yang terlaksana	65%	95%	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Urusan Wajib	Dinas Pekerjaan Umum,
6.	Meningkatkan efisiensi & efektifitas pelaksanaan perencanaan	Tersedianya dokumen perencanaan yang tepat waktu	1. Mengembangkan sistem perencanaan dan pengendalian berbasis data dan teknologi. 2. Meningkatkan infrastruktur dan teknologi informasi	Persentase pengembangan monitoring, evaluasi, dan teknologi informatika	0	100%	Program Pengembangan Monitoring, Evaluasi dan Teknologi Informatika	Urusan Wajib	Bappeda
				Persentase Ketersediaan Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan Kerjasama Pembangunan	100%	100%	Program Koordinasi Kerjasama Pembangunan	Urusan Wajib	Bappeda
				Persentase dokumen Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun	100%	100%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Urusan Wajib	Bappeda

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BABVII-34



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>outcome</i>)	Capaian Kinerja		Prog. Pemb. Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
7.	Menciptakan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu	Terciptanya sistem perencanaan yg terintegrasi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah	1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia, fungsi-fungsi koordinasi pengawasan dan pengendalian disemua tingkat pemerintahan dan wilayah 2. Meningkatkan sistem perencanaan terpadu melalui pengembangan fungsi-fungsi koordinasi dan pengendalian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kota Menengah dan Besar yang disusun	2 Dok	17 Dok	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Urusan Wajib	Bappeda
				Jumlah Dokumen Perencanaan Ekonomi yang disusun	2 Dok	25 Dok	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Urusan Wajib	Bappeda
				Persentase Kegiatan Perencanaan Sosial dan Budaya yang terlaksana	100%	100%	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Urusan Wajib	Bappeda
				Jumlah Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam yang disusun	2 Dok	2 Dok	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	Urusan Wajib	Bappeda
8.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Terakomodasinya aspirasi dan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1. Melibatkan masyarakat dalam perumusan pelaksanaan perencanaan pembangunan 2. Meningkatkan peran masyarakat dalam perumusan perencanaan pembangunan melalui proses dan tahapan perencanaan Pembangunan	Persentase peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah yang terlaksana	100%	100%	Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan Perencanaan Pembangunan	Urusan Wajib	Bappeda
9.	Terciptanya pemanfaatan ruang yang dapat mengakomodir seluruh kebutuhan pembangunan daerah dan sektor	Terciptanya alokasi ruang yang sesuai potensi dan daya dukung	1. Mendorong perencanaan penataruang wilayah berdasarkan ketentuan struktur, pola ruang dan kawasan strategis 2. Ruang wilayah melalui pengembangan infrastruktur, wilayah, permukiman dan	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) yang tersedia	0 Dok	13 Dok.	Program Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK)	Urusan Wajib	Bappeda
				Jumlah Dokumen Informasi SDA yang tersedia	2 Dok	14 Dok	Program Pengembangan Informasi SDA	Urusan Wajib	Bappeda

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>outcome</i>)	Capaian Kinerja		Prog. Pemb. Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			pusat-pusat kegiatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Wilayah	2 Dok	12 Dok	Program Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Urusan Wajib	Bappeda
				Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti diklat	20 org	80 Org	Program Pengembangan SDM	Urusan Wajib	Bappeda
				Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Secara Cepat, Tepat dan Akurat	100%	100%	Program Pengembangan Data dan Informasi	Urusan Wajib	Bappeda